

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB),
INVESTASI SWASTA, DAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN BOYOLALI
(Tahun 2002 – 2019)**

**Andri Saputra¹⁾
Suharno²⁾
Bambang Widarno³⁾**

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta
email : ¹⁾ bylandri@gmail.com

ABSTRACT

Regional Original Income (ROI) is all regional income derived from the original region's economy. The purpose of this study was to determine the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), private investment and local taxes on ROI. The population in this study is ROI Boyolali Regency, GRDP, private investment and local taxes with annual data for the period 2002–2019. Sampling using the Nonprobability Sampling method. The data analysis technique used is descriptive analysis, classical assumption test and hypothesis testing. The conclusion of the results of this study is that GDP and private investment have no significant effect on ROI, while local taxes have a significant effect on ROI.
Keywords: GRDP, private investment, local taxes, ROI

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah sebuah proses perubahan yang terjadi secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan target utamanya yaitu sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional selalu dimulai dari sebuah kondisi kehidupan yang belum baik menjadi sebuah kehidupan yang lebih baik untuk mencapai tujuan nasional sebuah bangsa (Siagian, 1985). Keadaan ini berimplikasi pada pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai aspek. Suatu otonomi daerah menciptakan desentralisasi yang berkaitan dengan perencanaan ekonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah dan aspek lain yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Setiap daerah mempunyai kewenangan komprehensif dalam mengelola sumber yang ada di daerah dalam rangka menaikkan kesejahteraan masyarakatnya (Mohammad, Firma, dan Heribertus, 2006: 185).

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implementasi desentralisasi fiskal memberikan kesempatan kepada daerah supaya melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, dengan dilimpahkannya keleluasaan dalam pengambilan keputusan fasilitas pelayanan dimasyarakatnya. Desentralisasi fiskal mempunyai penjelasan bahwa pemerintah daerah dilimpahkan kewenangan dalam mengelola keuangan sendiri yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling utama yaitu pajak daerah

dan retribusi daerah dengan memberikan batas kewajaran, selain itu juga harus adanya pertimbangan keuangan.

Berdasarkan teori basis ekonomi, indikator utama dalam peningkatan ekonomi sebuah daerah berhubungan langsung dengan permintaan terhadap barang atau jasa dari luar wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan daerah secara maksimal. Pada intinya teori ini membedakan kegiatan sektor basis (potensial) dan kegiatan sektor non basis (tidak potensial). Sektor basis yang memiliki hubungan dengan PAD antara lain PDRB dan pajak daerah. Sektor non basis yang mempunyai keterkaitan dengan PAD salah satunya adalah investasi swasta.

Investasi swasta adalah aktivitas penanaman modal swasta asing atau domestik yang realisasinya digunakan membeli barang atau jasa sehingga produksi barang atau jasa akan naik pada periode selanjutnya (Arsyad, 1999: 4). Adanya investasi swasta ini, pemerintah daerah akan mendapatkan penambahan modal yang dapat dimanfaatkan dalam mendanai pembangunan di wilayahnya. Hal tersebut dapat membuat perubahan di daerah dengan peningkatan PAD (Theodora, Rida, Yunika, 2014).

PAD yang meningkat dapat dilihat dari pembangunan di sebuah daerah. Hal ini dapat diketahui melalui aspek makro yang dianalisis dengan melihat PDRB sebuah daerah. PDRB yang meningkat dapat menambah pendapatan pemerintah daerah untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur dan dapat membuat pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat meningkat yang dapat berdampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakatnya.

PAD juga mempunyai keterkaitan dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang diberikan wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah dengan timbal balik secara tidak langsung (Mardiasmo, 2016: 14). Pajak daerah diklasifikasikan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Seiring diterapkannya otonomi daerah, pendapatan pajak daerah perlu ditingkatkan. Penerimaan pajak daerah dapat diimplementasikan dalam berbagai program dan yang perlu diingat yaitu pemerintah daerah diharuskan untuk mandiri dan dapat menggali potensi yang ada di daerah. Tentu saja ini akan meningkatkan PAD.

Target peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2018 seperti yang di paparkan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali, Fara Soraya Devianti mengatakan bahwa PAD Boyolali ditarget meningkat dari Rp 260,59 miliar, menjadi Rp 290,48 miliar. Dengan rincian, Pendapatan pajak daerah Rp 90,55 miliar, Retribusi Rp 14,9 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 11,396 serta pendapatan lain yang sah Rp 173,5 miliar (<http://fokusjateng.com/2018/01/09/target-peningkatan-pendapatan-apbd-boyolali-2018-capai-80-miliar>).

Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada PDRB, investasi swasta, dan pajak daerah. Hasil penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan oleh Mesra (2017) menyimpulkan PDRB, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Apindo (2017) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD, sedangkan Jumlah penduduk dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD. Penelitian Anita (2016) memberikan hasil bahwa Investasi swasta, Belanja modal

dan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Hasil itu bertentangan dengan penelitian Dian (2016) yang menyimpulkan investasi swasta berpengaruh positif tidak signifikan, sedangkan PDRB, Inflansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD. Penelitian yang dilaksanakan oleh Warsini (2019) memberikan hasil pajak daerah dan retribusi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Frangky (2017) yang menyimpulkan pajak daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap PAD.

Tujuan dilakukan penelitian yaitu: 1) Untuk menganalisis signifikansi pengaruh PDRB terhadap PAD di Kabupaten Boyolali. 2) Untuk menganalisis signifikansi pengaruh investasi swasta terhadap PAD di Kabupaten Boyolali 3) Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Boyolali.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi dipopulerkan Harry W. Richardson pada tahun 1973 menjelaskan bahwa aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi sebuah daerah berkaitan langsung dengan permintaan terhadap barang atau jasa dari luar wilayahnya (Arsyad, 1999: 116). Teori ini pada intinya membedakan kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis merupakan sektor pertumbuhan yang menentukan pembangunan secara komprehensif di wilayah tersebut, sedangkan kegiatan non basis adalah sektor sekunder (*city polowing*) yaitu berhubungan dengan pertumbuhan yang ada dari pembangunan yang komprehensif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang PAD yang mengemukakan bahwa PAD merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil sumber daya yang dipisahkan, dan PAD sah lainnya, yang memiliki tujuan untuk melimpahkan kebebasan daerah dalam mengelola penbiayaan dan pengimplementasian otonomi daerah agar terwujudnya asas desentralisasi. Penerimaan daerah salah satunya berasal dari pembelanjaan di daerah, PAD yang meningkat akan diiringi dengan bertambahnya penerimaan daerah sehingga kemandirian daerah tersebut meningkat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB yaitu jumlah nilai atas seluruh hasil yang diperoleh dari perekonomian suatu daerah, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat daerah maupun masyarakat wilayah lainnya yang bertempat tinggal di wilayah itu (Todaro, 2000). PDRB merupakan total nilai tambah dari faktor produksi dalam periode tertentu pada sebuah daerah atau total semua nilai barang atau jasa yang diperoleh dari semua aspek ekonomi pada sebuah wilayah.

Salah satu indikator dalam mengetahui tingkat pembangunan regional adalah PDRB, dalam hal ini meningkatnya produksi barang atau jasa pada PDRB. Nilai yang tercantum dalam PDRB menggambarkan taraf hidup dan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat daerah. PDRB ada yang menggunakan perhitungan dengan metode langsung dan tidak langsung.

Investasi Swasta

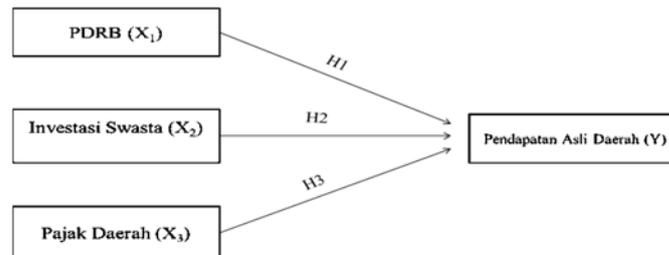
Investasi swasta adalah aktivitas penanaman modal swasta asing atau domestik yang realisasi modalnya digunakan membeli barang atau jasa sehingga produksi barang atau jasa akan naik pada periode selanjutnya (Arsyad, 1999: 4). Melalui pengertian investasi swasta tersebut maka dapat dikembangkan sebuah pemahaman insentif swasta yaitu investasi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam menstimulus investasi sektor swasta baik yang bersifat umum ataupun dalam bidang khusus (Pass dan Bryan, 1998: 332-333). Rangsangan investasi yang dilimpahkan oleh pemerintah dapat berwujud bantuan modal untuk peralatan atau pembebasan pajak daerah dan mengusahakan infrastruktur untuk mencari calon investor swasta, dengan tujuan memberi area pengembangan dengan memberikan bantuan tambahan untuk mengatasi masalah pengangguran.

Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai undang-undang tanpa memperoleh timbal balik secara langsung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pajak yang dipungut dari penduduk sebuah daerah dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemerintah dan kesejahteraan umum sebuah daerah, seperti infrastruktur jalan, membuka lapangan kerja, kelangsungan pembangunan dan program lainnya. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) salah satu sumbernya berasal dari pendapatan pajak daerah yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai rencana strategisnya.

HIPOTESIS



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan **Gambar 1**, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H2: Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H3: Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data kuantitatif berupa numerik dan dianalisis dengan statistik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari data PAD, PDRB, Investasi Swasta dan Pajak Daerah dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali dan www.djpk.kemenkeu.go.id tahun 2002-2019.

Populasi dan Sampel

Populasinya yaitu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, PDRB, Investasi swasta dan Pajak daerah, populasi diambil dari tahun 2002 – 2019. Sampel menggunakan data *time series* yaitu PAD, PDRB, Investasi Swasta dan Pajak Daerah dari tahun 2002 – 2019. Penentuan sampelnya menggunakan metode sampel jenuh.

Definisi Operasional dan Pengukurannya

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1)

PDRB adalah total nilai barang atau jasa yang diproduksi di semua kabupaten/kota dalam satuan jutaan rupiah. Data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali tahun 2002 – 2019. Perhitungan PDRB di Kabupaten Boyolali menggunakan metode langsung yakni PDRB adhk Perkapita. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PDRB atas dasar harga konstan} \\ \text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}$$

2. Investasi Swasta (X_2)

Investasi Swasta adalah aktivitas penanaman modal swasta asing atau domestik yang pemanfaatannya digunakan membeli barang atau jasa sehingga produksi barang dan jasa akan naik di masa depan. Berdasarkan pada UU No.25 tahun 2007. Didapatkan dari dua aspek penerimaan yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), Investasi swasta yang digunakan adalah data tahun 2002-2019 dalam satuan rupiah. Rumus yang digunakan untuk perhitungannya adalah

$$\text{Total Investasi} = \text{PMA} + \text{PMDN}$$

3. Pajak Daerah (X_3)

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang disetorkan oleh orang/badan kepada daerahnya dengan timbal balik yang tidak secara langsung diterima oleh wajib pajak. Pajak daerah yang digunakan diambil dari data Djpk.kemenkeu.go.id tahun 2002-2019. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pajak daerah} = \text{Pajak hotel} + \text{Pajak Restoran} + \text{Pajak Hiburan} + \text{Pajak Reklame} + \text{Pajak Penerangan Jalan} + \text{Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan} + \text{Pajak Parkir} + \text{Pajak Air Tanah} + \text{Pajak PBB Pedesaan/perkotaan} + \text{Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.}$$

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

PAD adalah penerimaan yang bersumber dari pendapatan di daerahnya sendiri (Halim dan Nasir, 2006: 44). Data diambil dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali dari tahun 2002 – 2019. Di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Hasil Pajak Daerah} + \text{Hasil Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah} + \text{lain-lain PAD yang sah.}$$

TEKNIK ANALISIS DATA

1. Analisis Deskriptif

Hasil dari statistik deskriptif mempunyai tujuan supaya dapat memberikan gambaran mengenai data penelitian yang dilakukan dengan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik memiliki tujuan supaya dapat mengetahui apakah model regresi dalam suatu penelitian baik atau tidak. Uji asumsi klasik yang diterapkan adalah multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas.

3. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data penelitian ini adalah koefisien determinasi (R^2), uji F dan uji t.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yang disajikan adalah *mean*, *maximum*, *minimum* dan standar deviasi. Pengolahan data dalam analisis deskriptif ini memanfaatkan program IBM SPSS *Statistic 21*. Hasil data dari setiap variabel digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	18	1073838	23590610	9180705.7778	8374708.67299
IS	18	162900000000	2579220480958	1027257445996.1112	679383679940.36460
PD	18	4334370000	134430549029	38193182850.0556	39427498220.84463
PAD	18	24460330000	388014880210	142927145716.8333	114124305789.92871
Valid N (listwise)	18				

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2020)

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel PDRB didapatkan nilai minimum sebesar Rp 1.073.838,00 pada tahun 2002 dan nilai maksimum PDRB sebesar Rp 23.590.610,00 yakni pada tahun 2019 Sedangkan, nilai *mean* PDRB sebesar Rp 9.180.705,87.

b. Investasi Swasta (X_2)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Investasi Swasta didapatkan nilai minimum sebesar Rp 162.900.000.000,00 pada tahun 2002 dan nilai maksimum Investasi Swasta sebesar Rp 2.579.220.480.958,00 yakni pada tahun 2013 Sedangkan, nilai *mean* Investasi Swasta sebesar Rp 1.027.257.445.996,11.

c. Pajak Daerah (X_3)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Pajak Daerah didapatkan nilai minimum sebesar Rp 4.334.370.000,00 pada tahun 2002 dan nilai maksimum Pajak Daerah sebesar Rp 134.430.549.029,00 yakni pada tahun 2018 Sedangkan, nilai *mean* Pajak Daerah sebesar Rp 38.193.182.850,05.

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel PAD didapatkan minimum senilai Rp 24.460.330.000,00 pada tahun 2002 dan nilai maksimum pendapatan asli daerah sebesar Rp 388.014.880.210,00 yakni pada tahun 2017 Sedangkan, nilai *mean* pendapatan asli daerah sebesar Rp 142.927.145.716,83.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji ini mempunyai tujuan supaya mengetahui kelayakan atas model regresi pada suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Nilai <i>Tolerance</i> : 0,164; 0,865; 0,164 > 0,10. Nilai <i>VIP</i> : 6,094; 1,155; 6,113 < 10.	Tidak ada
Uji autokorelasi	Nilai <i>p-value</i> : 0,224 > 0,05.	Tidak ada
Uji heteroskedastisitas	Nilai <i>p-value</i> : 0,363; 0,283; 0,235 > 0,05	Tidak ada
Uji normalitas	Nilai <i>p-value</i> : 0,628 > 0,05	Residual normal

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2020)

3. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian dilaksanakan dengan menerapkan model analisis regresi linear berganda, yakni menggunakan uji statistik F, dan uji statistik t dan uji koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Statistik F

Uji ini mempunyai tujuan supaya mengetahui apakah variabel bebas (X)

secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji dengan memanfaatkan program SPSS 21 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regrsesion	20816757542836054000 0000.000	3	69389191809453520000000. 000	73.336	.000 ^b
Residual	13246496496203050000 000.000	14	946178321157360700000.00 0		
Total	22141407192456360000 0000.000	17			

a. *Dependent Variable:* PAD

b. *Predictors:* (Constant), PD, IS, PDRB

(Sumber : Data sekunder yang telah diolah tahun 2020)

Berdasarkan **Tabel 3**, hasil F hitung memiliki nilai 73,336 dengan signifikansinya 0,000 jadi H_0 ditolak dan H_a diterima. Tingkat signifikansi $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa variabel PDRB, investasi swasta dan pajak daerah berpengaruh terhadap variabel PAD. Pengaruh secara simultan dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat menjadikan model regresi penelitian dikriteriakan cocok atau *fit*.

b. Uji Statistik t

Uji ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hasil uji dengan memanfaatkan program SPSS 21 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4. Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	26659369168.382	14199553800.369		1.877	.081
PDRB	1747.202	2199.038	.128	.795	.440
IS	.008	.012	.047	.673	.512
PD	2.411	.468	.833	5.153	.000

a. *Dependent Variable:* PAD

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2020)

Berdasarkan **Tabel 4**, didapatkan hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 26659369168,382 + 1747,202 X_1 + 0,008 X_2 + 2,411 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai konstanta sebesar 26659369168,382. Artinya apabila PDRB, investasi swasta dan pajak daerah adalah nol maka PAD adalah sebesar 26659369168,382. PDRB tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD, hasil ini dikarenakan nilai variabel PDRB $0,440 > 0,05$ dan nilai betanya yaitu positif sebesar 1747,202.

Variabel investasi swasta tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD, hasil ini dikarenakan nilai variabel investasi swasta $0,512 > 0,05$

dan nilai beta yang dihasilkan yaitu positif sebesar 0,008.

Variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD, hasil ini dikarenakan nilai variabel pajak daerah $0,000 < 0,05$. Adapun nilai betanya yaitu positif sebesar 2,411.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Adapun hasil uji koefisien determinasi pada tabel berikut:

Tabel 5. Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.970 ^a	.940	.927	30760011722.32158

a. Predictors: (Constant), PD, IS, PDRB

(Sumber: Data sekunder 2020)

Hasil dari pengujian koefisien determinasi memperlihatkan *Adjusted R Square* senilai 0.927. Hasil ini menyimpulkan bahwa 92,7% variabel PAD dijelaskan oleh variabel PDRB, investasi swasta dan pajak daerah. Sisa dari 7,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh PDRB terhadap PAD

Hasil analisis menyatakan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD, yang berarti jika PDRB naik maka PAD naik. Berdasarkan uji statistik t, variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD memiliki nilai beta sebesar 1747,202 dan tingkat signifikansi yaitu 0,440. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PDRB positif dan tidak signifikan terhadap PAD karena hasil signifikansinya $0,440 > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil uji ini tidak sesuai dengan hipotesis karena PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap PAD, maka H_1 ditolak.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Sari, Ethika dan Dandes (2016) yang menyimpulkan bahwa PDRB positif tidak signifikan terhadap PAD, sedangkan Jumlah Penduduk dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap PAD.

Teori basis ekonomi menyatakan PDRB merupakan salah satu sektor basis (potensi). Sektor basis ini belum dapat dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten Boyolali sehingga PDRB yang diserap belum secara optimal mempengaruhi PAD. Hal ini dikarenakan *Tax effort* yang dilaksanakan pemerintah daerah belum optimal, menyebabkan masih besar potensi penerimaan pajak di Kabupaten Boyolali yang belum tercover. Ada banyak wajib pajak yang masih malas membayar kewajiban pajak dan retribusi kepada daerahnya, ini menjadi penyebab terbesar PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD.

2. Pengaruh Investasi Swasta terhadap PAD

Hasil analisis menyatakan bahwa investasi swasta memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD, yang artinya jika Investasi Swasta naik maka PAD naik. Berdasarkan uji statistik t, investasi swasta positif dan tidak signifikan terhadap PAD mempunyai nilai beta 0,008 dan tingkat signifikan 0,512. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi swasta tidak berpengaruh terhadap PAD dikarenakan hasil signifikannya $0,512 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Hasil uji tidak sesuai dengan hipotesis karena investasi Swasta tidak memiliki pengaruh terhadap PAD, maka H_2 ditolak.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang telah dilaksanakan Dzakiyyah, Susanti dan Pahala (2018) bahwa Investasi tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD, sedangkan Pertumbuhan ekonomi dan Kunjungan wisatawan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan teori basis ekonomi, investasi swasta merupakan salah satu sektor non basis atau *local industry*. Perkembangan investasi swasta di Kabupaten Boyolali belum maksimal yang disebabkan pertumbuhan industri yang memanfaatkan sumber daya lokal termasuk bahan baku dan tenaga kerja masih rendah sehingga PAD yang diterima tidak optimal. Dapat penulis jelaskan bahwa investasi swasta tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Boyolali, dikarenakan tingginya pajak PMA di Indonesia mencapai 30% sehingga pertimbangan investor cukup tinggi, sedangkan di Singapura hanya 20% bahkan akan menjadi 18%. Faktor lainnya minimnya dana perbankan yang disalurkan ke sektor riil dan kebijakan kepala daerah yang berubah – ubah.

3. Pengaruh pajak daerah terhadap PAD

Berdasarkan uji statistik t, pajak daerah berpengaruh pada PAD memiliki nilai beta sebesar 2,411 dan tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD karena hasil nilai signifikansi $2,411 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis karena pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, maka H_3 diterima.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Warsini (2019) mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD di Kabupaten Klaten tahun 2011-2017 menghasilkan penelitian berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Klaten.

Pajak daerah merupakan salah satu sektor basis (potensi) berdasarkan teori basis ekonomi. Penyerapan sektor basis ini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali telah maksimal sehingga dapat mempengaruhi penerimaan PAD secara optimal. Hasil ini dapat menerangkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Boyolali, dimana jika pajak daerah Kabupaten Boyolali meningkat, maka PAD juga meningkat, begitu juga sebaliknya jika pajak daerah menurun maka PAD juga akan menurun.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini PDRB memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Boyolali. Investasi swasta memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Boyolali. Pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2016. *Pedoman Penyusunan Penelitian dan Skripsi Fakultas Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Dzakiyyah, Susanti, Pahala. 2018. “Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta”. *Jurnal Akuntansi Ekonomi*. Universitas Negeri Jakarta.
- Frangky Martinus Mea, Vicky V. J panelewen, dan Arie D. P Mirah. 2017. “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasan”. *Jurnal Ekonomi*. Vol.13 No.2. Universitas Sam Ratulangi.
- Lestari, Dian. 2016. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2541-3400, Universitas Tarumanagara
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Mesra B, S.E, M.M. 2017. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Manajemen Tool*. Vol. 8 No. 2. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mohammad Mahsun. Firma S dan Heribertus AP. 2006. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Novita, Ika Anita. 2016. “Pengaruh Investasi, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sukoharjo, Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi”. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 12 No. 1 , Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Sondang P. Siagian. 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: BumiAksara.
- Slivia Mira Sari, Ethika, Dandes. 2016 “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2014”. *Jurnal Akuntansi Ekonomi*. Universitas Bung Hatta.
- Theodora Ririn, Rida Prihatini, dan Yunika Murdayanti. 2014. “Pengaruh Belanja Modal. Investasi. dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah”. *Jurnal Ilmiah Wahana Akutansi*. Vol. 9 No. 1. 36-5.
- Tjiptoherijanto, Priyono. 1999. *Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*. FE UI. Jakarta.
- Todaro. Michael. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

- Yulianto. 2019. Target Peningkatan Pendapatan APBD Boyolali 2018 Capai Rp 80 Miliar.
<http://fokusjateng.com/2018/01/09/target-peningkatan-pendapatan-apbd-boyolali-2018-capai-80-miliar> diakses 28 September 2019.
- Warsini. 2019. “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten Periode 2011-2017”. *Skripsi* (publikasi) Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma. Klaten